

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah buta aksara sebagai suatu masalah nasional sampai saat ini masih belum tuntas sepenuhnya. Berbagai usaha dalam upaya penanggulangannya masih mengalami hambatan sehingga program-program yang diluncurkan untuk menanggulanginya berupa pengorganisasian kelompok belajar keaksaraan fungsional, tampaknya belum efektif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya lain, sehingga jumlah buta aksara dari tahun ke tahun akan makin menipis.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 dan Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2005-2009 secara tegas Indonesia menetapkan bahwa pada akhir 2009, angka buta aksara usia 15 tahun ke atas hanya tersisa 5% atau 7,7 juta orang. Sementara itu, sampai dengan akhir 2006, angka buta aksara kelompok usia tersebut masih sekitar 8,06% atau 12,88 juta orang.

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas, menyadari betul bahwa upaya pencapaian target tersebut bukan perkara mudah. Pencapaian target tersebut akan menjadi makin sulit, seandainya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun juga kurang berhasil. Hal ini tidak lain karena jumlah *drop out* SD/MI, khususnya kelas I,II dan III, cenderung menambah angka buta aksara.

Keterkaitan antara tingkat keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar dengan angka buta aksara serta pentingnya upaya memenuhi hak setiap

warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, telah mendorong pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Hasil Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). Tujuannya adalah agar penuntasan kedua program tersebut menjadi sebuah gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa, sehingga target dari kedua program tersebut dapat tercapai.

Namun demikian, berbagai ketentuan di dalam Inpres tersebut belum mampu menjawab hal-hal teknis yang bersifat operasional. Untuk menjabarkan berbagai ketentuan Inpres tersebut, Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).

Upaya meningkatkan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung, bagi warga belajar buta aksara telah dilaksanakan berbagai program, antara lain Program Pemberantasan Buta Huruf ( PBH ), Program Kejar Paket A dan Program Kejar Paket A OBAMA (Operasi Bhakti ABRI Manunggal Aksara). Akan tetapi program-program tersebut kurang efektif untuk meningkatkan kecakapan membaca menulis dan berhitung warga masyarakat. Sasaran pemberantasan buta aksara tahun 2003 adalah 5,9 juta, akan tetapi justru hasil Supas menunjukkan adanya peningkatan jumlah warga masyarakat yang masih buta aksara. Kendala yang banyak dihadapi oleh para pelaksana adalah rendahnya motivasi warga belajar untuk mengikuti program Kejar Paket A. Hal

tersebut ditandai kurang bersemangatnya warga belajar ketika mengikuti serangkaian program yang berkaitan dengan pemberantasan buta aksara.

Program ini menuntut kinerja pengelola keaksaraan fungsional yang memadai. Dalam melaksanakan perannya pengelola keaksaraan fungsional bekerjasama dengan tutor. Peran tutor tidak hanya pada proses pembelajaran *calistung* akan tetapi mulai dari merencanakan kegiatan belajar, mengidentifikasi minat dan kebutuhan warga, menyusun kurikulum bersama warga belajar, mencari bahan belajar sekaligus menyesuaikan dengan kemampuan warga belajar dan mengevaluasi proses pembelajaran yang partisipatif. Pembelajaran keaksaraan fungsional perlu melibatkan warga belajar mulai dari perencanaan program belajar sampai dengan penilaian hasil belajar.

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pengelola keaksaraan fungsional, di antaranya keberadaan program pendidikan keaksaraan, sumber daya manusia, motivasi kerja kepala desa, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, aktivitas tutor, dan sebagainya. Dari faktor tersebut, faktor yang dominan adalah aktivitas tutor dan motivasi kerja kepala desa. Hal tersebut disebabkan aktivitas tutor dalam pembelajaran keaksaraan fungsional merupakan dasar berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Jika tutor tidak memiliki aktivitas dalam program tersebut maka dapat dipastikan kegiatan pembelajaran keaksaraan fungsional tidak dapat berjalan secara optimal sehingga akan berdampak pada kinerja pengelola keaksaraan fungsional. Demikian juga, motivasi kerja kepala desa. Kepala desa merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam program keaksaraan fungsional di setiap desa yang tersebar dalam berbagai kelompok belajar.

Idealnya, pemahaman yang holistik mengenai aktivitas tutor dan motivasi kerja kepala desa yang tinggi dalam menyukseskan program keaksaraan fungsional maka akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja pengelola keaksaraan fungsional.

Realitas di lapangan khususnya di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa kinerja pengelola keaksaraan fungsional belum dapat dilihat secara optimal, padahal mereka sudah memiliki *job description* tugas yang jelas. Secara umum motivasi kerja kepala desa dalam menanggapi program keaksaraan fungsional cukup beragam. Ada kepala desa yang cukup antusias namun ada juga yang terkesan masa bodoh dan kurang peduli terhadap program keaksaraan fungsional sehingga berdampak pada kinerja para pengelola keaksaraan fungsional. Di sisi lain, aktivitas tutor belum terlihat optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurang gigihnya tutor dalam menyusun program pembelajaran dan melaksanakan program tersebut sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran keaksaraan fungsional cenderung terkesan jalan tanpa ada persiapan yang matang dari para tutor.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara empirik mengenai kontribusi aktivitas tutor dan motivasi kerja kepala desa terhadap kinerja pengelola keaksaraan fungsional di Kabupaten Kendal tahun 2008.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah adakah kontribusi aktivitas tutor dan

motivasi kerja kepala desa terhadap kinerja pengelola keaksaraan fungsional di Kabupaten Kendal tahun 2008?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi aktivitas tutor dan motivasi kerja kepala desa terhadap kinerja pengelola keaksaraan fungsional di Kabupaten Kendal tahun 2008.

### **D. Manfaat Penelitian**

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoretis maupun praktis. Secara teoretis, jika dalam penelitian ini aktivitas tutor dan motivasi kerja kepala desa terbukti memiliki kontribusi dengan kinerja pengelola keaksaraan fungsional, berarti hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan teori untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan program pendidikan keaksaraan fungsional. Selebihnya penelitian ini juga akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan menambah kasanah bagi manajemen pendidikan.

Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan:

1. Bagi pengelola keaksaraan fungsional, untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka melaksanakan tugasnya mengelola kelompok belajar dalam program keaksaraan fungsional;
2. Bagi Penilik Pendidikan Non Formal, sebagai sarana untuk memberikan masukan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
3. Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kendal, sebagai sarana bahan masukan untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program keaksaraan fungsional.